

## ABSTRAK

Hukum Investasi internasional adalah ranah baru dalam hukum publik internasional yang dibuat oleh Bank Dunia setelah mendirikan institusi arbitrase internasional permanen, yaitu Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional (*International Center for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID) pada tahun 1965. ICSID merupakan sebuah sistem *hybrid* dalam privatisasi hukum publik yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan pribadi dengan mengaplikasikan hukum publik internasional. Sistem ini dinamakan sistem penyelesaian sengketa investasi antara investor dan negara *Investor-State-Dispute-Settlement* (ISDS) yang hanya dapat digunakan oleh investor asing berdasarkan ketentuan ISDS sebagaimana diatur di dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT) atau *International Investment Agreement* (IIA) terhadap Negara Tujuan investasi. Indonesia berpartisipasi dalam sistem ISDS sejak tahun 1968 dan terlibat dengan 12 kasus yang diketahui dalam ISDS. Para sarjana, pejabat pemerintah, dan pengacara di seluruh dunia terus menerus mengkritik dan bereaksi terhadap sistem ISDS. Selama pemerintahan Trump, sistem ISDS pernah menjadi salah satu prinsip utama kebijakan penanaman modal asing (FDI) Amerika, secara mendadak hilang dari kebijakan baru BIT setelah negosiasi ulang NAFTA. Berkaca melalui argumentasi internasional baru tentang anti sistem ISDS, disertasi ini akan mengulas argumentasi lama tentang ISDS dari sudut pandang kepatutan di Indonesia serta kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai Negara Tujuan investasi dengan menerapkan Pendekatan Hukum dan Konseptual. Disertasi ini memberikan penelitian dan analisa langsung dan komprehensif pada sistem ISDS baik dari aspek hukum dengan cara normatif maupun aspek ekonomi dengan menganalisa biaya sistem ISDS berdasarkan teori efisiensi Richard A. Posner yang dikembangkan dari Analisis Ekonomi atas Hukum. Studi ini juga mencari alternatif untuk sistem ISDS dikarenakan biaya yang tinggi dan inefisiensi untuk Indonesia, mengingat dugaan campur tangan dengan keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Konstitusi Indonesia. Sebagai kesimpulan, disertasi ini merekomendasikan bahwa sengketa FDI diselesaikan oleh sistem pengadilan nasional alih-alih sistem ISDS atau arbitrase internasional serupa.

Kata Kunci: ICSID, Hukum Investasi, ISDS, BIT/IIA, Teori Efisiensi

## ABSTRACT

International investment law is a recent field of public international law created by the World Bank after it established a permanent international arbitration institute, the International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), in 1965. It is a hybrid system in its privatization of public law that is designed to resolve private interest disputes by applying public international law. This is called the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) system and can only be invoked by foreign investors against host states, as based on ISDS articles written in bilateral investment treaties (BIT) or international investment agreements (IIA). Indonesia has participated in the ISDS system since 1968 and experienced 12 known ISDS cases, though it has also faced criticism for being an ICSID member. Indeed, scholars, government officials, and attorneys worldwide have continuously critiqued and contributed to backlash against the ISDS system. During the Trump administration, for instance, the ISDS system, which was once one of the U.S. FDI policies' core principles, suddenly disappeared from a new U.S. BIT after NAFTA renegotiations. Reflecting this recent wave of new international anti-ISDS arguments, this dissertation aims to re-visit the old ISDS argument from the viewpoint of its necessity in Indonesia and Indonesia's economic development as a host state by implementing the statute and conceptual approach. The dissertation provides straightforward and comprehensive research and analysis of the ISDS system from both a legal aspect in a normative way and an economics aspect by analyzing the ISDS system's cost under Richard A. Posner's theory of efficiency developed in *Economic Analysis of Law*. This study also seeks an alternative to the ISDS system due to its high costs and inefficiency for Indonesia, given its alleged interference with justice as described in the Indonesian constitution. Conclusively, this dissertation recommends that FDI disputes be settled by a domestic court system instead of the ISDS system or similar international arbitration.

Keyword: ICSID, Investment law, ISDS, BIT/IIA, Theory of efficiency